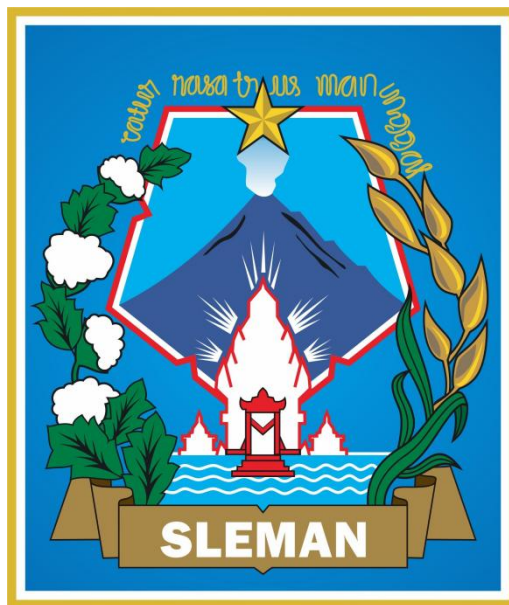


**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025-2029**



**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029. Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan serta pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Rancangan Awal Rencana Srategis ini memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang aka dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Rencana Srategis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini. Semoga Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Sleman, 29 April 2025

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19700429 199603 2 006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI UKM 12

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.1.2. Struktur Perangkat Daerah 13

2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah 18

2.1.4. Urusan yang diampu Perangkat Daerah 19

2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 27

2.2.1. Permasalahan 27

2.2.2. Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .. 37

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM 37

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM 39

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 43

BAB V INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI UKM 59

BAB VI PENUTUP 80

LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Dinas Menurut Jabatan	18
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdsarkan Golongan	18
Tabel 3 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan	19
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Dinas	19
Tabel 5 Anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2020.....	21
Tabel 6 Anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2021-2024	22
Tabel 7 Capaian Kinerja SPM Tahun 2020-2024	24
Tabel 8 Sasaran dan Mitra Perangkat Daerah	25
Tabel 9 Permasalahan Kinerja Sektor Sekunder	29
Tabel 10 Pemetaan Isu Strategis	35
Tabel 11 Indikator Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 12 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	39
Tabel 13 Strategi Renstra PD (Imendagri 2)	42
Tabel 14 Uraian Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan ..	44
Tabel 15 Uraian Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, SubKegiatan, Output, beserta dengan Target dan Pagu Indifikatif	58
Tabel 16 Program Prioritas Kabupaten Sleman yang selaras dengan kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi UKM Sleman	73
Tabel 17 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi dan UKM) Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Sleman yang menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Demi mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif Dinas Koperasi dan UKM perlu menyusun rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berkaitan dengan hal tersebut. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Sleman untuk lima tahun mendatang.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dasar negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan asas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 33 ayat 4).

Pemberdayaan koperasi dan UKM dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan melalui pemberian kesempatan berusaha secara legal, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, perlindungan usaha bagi koperasi dan UKM yang berkembang ditengah masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan pemberdayaan koperasi dan UKM agar memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Kabupaten Sleman dan pelakunya. Pendekatan pengembangan kemandirian koperasi dan UKM di Kabupaten Sleman dilakukan

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, penguatan skala ekonomi, peningkatan daya saing bagi koperasi dan UKM untuk menghadapi kondisi global dan kondisi pasar yang dinamis.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Saat ini, pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah menghadapi tantangan yang dinamis di tengah kondisi ketidakpastian global, perang dagang, dan menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, koperasi dan UKM memiliki peran untuk meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian, terutama menciptakan lapangan pekerjaan, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan pengembangan koperasi saat ini menjadi perhatian Presiden hingga menerbitkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi Presiden ini juga diikuti dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk di dalamnya menginstruksikan untuk mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Mengingat pentingnya koperasi dan UKM bagi perekonomian, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam menghadirkan layanan pada pelaku UKM dan koperasi di Kabupaten Sleman selama tahun 2025-2029 yang tertuang dalam rencana strategis ini.

Visi Bupati Sleman tahun 2025-2030 adalah ***Membangun Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban***. Penjelasan dari visi tersebut adalah:

- Maju : Perwujudan kondisi masyarakat Sleman yang memiliki tingkat ekonomi yang merata, teknologi yang tinggi, dan standar hidup yang tinggi dengan mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, namun pertumbuhan ekonomi yang

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sleman.

- Adil : Perwujudan kondisi masyarakat Sleman yang mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, tanpa adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
- Makmur : Pembangunan di Kabupaten Sleman dilaksanakan dalam rangka peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat, yaitu 6 layanan dasar wajib, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin.
- Lestari : Pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, sehingga tercipta kondisi lingkungan yang terjaga keseimbangan ekologis dan sumber daya alam untuk dapat mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- Berkeadaban : Perwujudan karakter utama masyarakat Sleman yang senantiasa percaya diri dalam bertindak, memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tata Kerja Dinas serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman yang juga memuat Visi, Misi Bupati Sleman Tahun 2025-2030, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan dari Kabupaten Sleman. Selain itu, Rencana Strategis ini juga mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk isu yang berkaitan dengan ruang lingkup dari pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai aturan lebih rinci dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi UKM untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2026 sampai dengan 2030 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah (DPA PD).

Penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM memegang prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Maka dari itu, luasnya dimensi waktu menjadikan Rencana Strategis ini disusun secara cermat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman tahun 2025-2030 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang penetapannya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17).
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PLUT Koperasi UKM;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 6)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025 - 2030 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman 2025 – 2030 yang menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2025 - 2030 adalah :

1. Memberikan arah (*road map*) dan pedoman bagi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Koperasi UKM dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.

4. Mengefisiensikan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2025 - 2030 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
2. Mengoptimalkan tugas pokok Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Sleman.
3. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan program kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman Tahun 2025 - 2030, fungsi Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Koperasi Ukm

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan rencana program dan kegiatan dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun kedepan.

**BAB VI Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Menjelaskan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI UKM

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah urusan pemerintahan bidang koperasi serta usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati No 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan UKM dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kelompok UPTD PLUT KUKM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Koperasi terdiri dari:
 - a. Tim Kerja Kelembagaan;
 - b. Tim Kerja Usaha; dan
 - c. Tim Kerja Pengawasan.
4. Bidang Usaha Mikro terdiri dari:
 - a. Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. Tim Kerja Jaringan Usaha dan Kemitraan; dan
 - c. Tim Kerja Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

A. Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Pelaksanaan urusan umum;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan keuangan;
6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan ketugasan, sekretariat memiliki 2 (dua) sub bagian yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- i. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- ii. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- iii. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- iv. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- v. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- vi. Pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi dan pengaduan;
- vii. Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- viii. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- ix. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- x. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbagian umum dan kepegawaian.

b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- i. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

- ii. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 - iii. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - iv. Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - v. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - vi. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - vii. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- C. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan pengawasan koperasi. Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
 - 2. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan pengawasan koperasi;
 - 3. Penyusunan data koperasi;
 - 4. Pendampingan dan penyuluhan penguatan badan hukum koperasi
 - 5. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan koperasi;
 - 6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - 7. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan koperasi;
 - 8. Pelaksanaan peningkatan produktivitas, pemasaran produk, dan restrukturisasi usaha koperasi;
 - 9. Pelaksanaan dan pembinaan pemulihan usaha koperasi;
 - 10. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan koperasi;
 - 11. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
 - 12. Fasilitasi pendampingan dan bantuan hukum bagi koperasi;
 - 13. Penilaian kesehatan koperasi;
 - 14. Penilaian koperasi berprestasi; dan
 - 15. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Koperasi.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Bidang Koperasi memiliki 3 tim kerja. Tim Kerja ini terdiri dari :

- i. Tim Kerja Kelembagaan Koperasi
- ii. Tim Kerja Pembinaan Usaha Kerja Koperasi
- iii. Tim Kerja Pengawasan Koperasi

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

D. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro. Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
2. Perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
3. Penyusunan data usaha mikro;
4. Penumbuhan usaha mikro;
5. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang;
6. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
7. Pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
8. Pelaksanaan fasilitasi usaha mikro dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Pengoordinasian penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik;
10. Pembinaan peningkatan produktivitas dan pemasaran;
11. Fasilitasi aksesibilitas sumber pembiayaan usaha mikro;
12. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
13. Pemulihan usaha mikro;
14. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro, dan hak kekayaan intelektual usaha mikro;
15. Fasilitasi pendampingan dan bantuan hukum bagi usaha mikro;
16. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perizinan usaha mikro; dan
17. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Mikro.

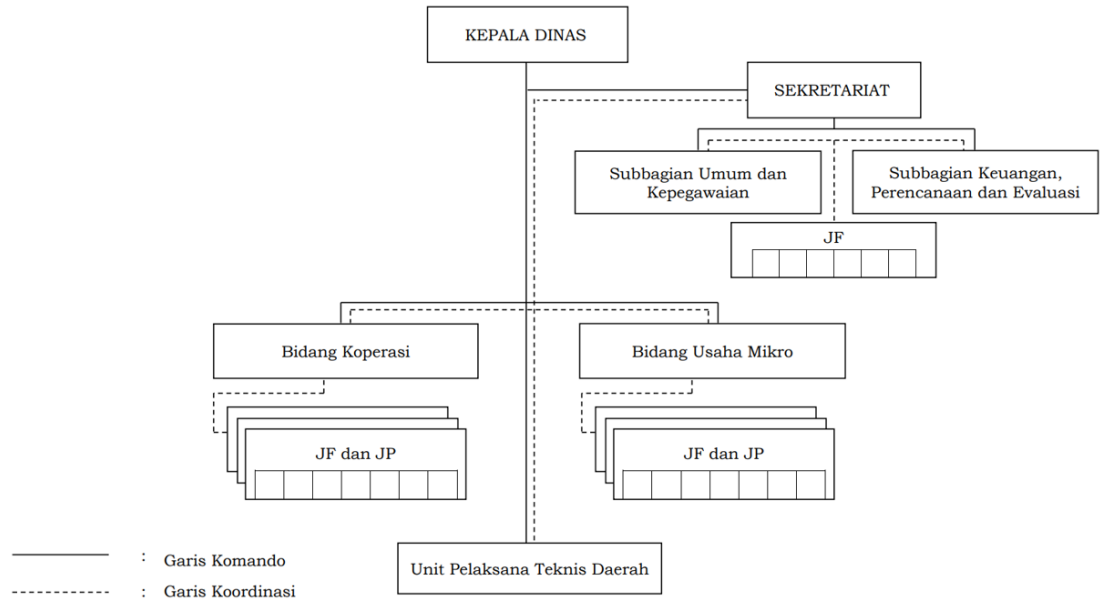
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Usaha Mikro memiliki tim kerja yang terdiri dari :

- i. Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro
- ii. Tim Kerja Jaringan Usaha dan Kemitraan
- iii. Tim Kerja Fasilitas Layanan dan Pembiayaan

E. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH



Gambar 2.1. Bagan Struktur Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sleman

Sasaran layanan dari Dinas Koperasi dan UKM adalah anggota dan pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampiran bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah usaha mikro.

2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasannya, Dinas Koperasi dan UKM memiliki SDM sebanyak 36 orang yang terdiri dari pria 11 orang (31%) dan wanita 25 orang (69%). Adapun rincian dari seluruh SDM dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman Menurut Jabatan

No	Perangkat Daerah	Urusan pemerintah/Fungsi Penunjang	Struktural	Fungsional		Total
			PNS	PNS	PPPK	
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	6	23	7	36

- a. Ringkasan jumlah ASN menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				PPPK	Jumlah
		IV	III	II	I		
1	Kepala	1					1
2	Sekretariat	2	7	3			12
3	Bidang Koperasi	3	4			7	14
4	Bidang Usaha Mikro	2	7			0	9
	Jumlah	8	18	3		7	36

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

- b. Ringkasan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S-1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	4	3	2	3			12
3	Bidang Koperasi	2	10	1	1			14
4	Bidang Usaha Mikro	2	7	0	0			9
	Jumlah	9	20	3	4			36

2.14. Urusan yang diampu Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM mengampu urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, saat ini didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Dinas

Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	baik
1.3.2.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	baik
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	baik
1.3.2.03.01.04	Perkakas Bengkel Service	1	baik
1.3.2.03.02.05	Perkakas Standard (Standard Tools)	2	baik
1.3.2.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	1	baik
1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1	baik
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	77	baik
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	16	baik
1.3.2.05.02.01	Meubelair	266	baik
1.3.2.05.02.02	Alat Pengukur Waktu	4	baik
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	2	baik
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	57	baik
1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	21	baik

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	217	baik
1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	7	baik
1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	12	baik
1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	26	baik
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	23	baik
1.3.2.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	250	baik
1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	4	baik
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	3	baik
1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	18	baik
1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	9	baik
1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	6	baik
1.3.2.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1	baik
1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	11	baik
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	84	baik
1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	10	baik
1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	2	baik
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	41	baik
1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	1	baik
1.3.2.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	13	baik
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	3	baik
1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	1	baik
1.3.4.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1	baik
1.3.5.01.01.01	Buku Umum	17	baik
1.3.5.01.01.04	Buku Ilmu Sosial	40	baik
1.3.5.01.01.05	Buku Ilmu Bahasa	2	baik
1.3.5.01.01.07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3	baik
1.3.5.01.01.08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	2	baik
1.3.5.01.01.09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	1	baik

2.1.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5.1 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Dinas Koperasi dan UKM pada tahun pada Tahun 2020 s/d 2024 mengacu pada Renstra Tahun 2016 s/d 2020 dan Renstra 2021 s/d 2026. Nomenklatur dan program yang dilaksanakan berbeda antara kedua Renstra tersebut, sehingga kami sampaikan pada tabel berikut:

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 5 Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Uraian Program	2020		
		Anggaran	Realisasi	Persentase(%)
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	258,341,525	255,968,025	99.08
2	Program Pelayanan Asministrasi Perkantoran	913,898,779	867,060,636	94.87
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	279,686,400	263,402,192	94.18
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11,478,750	11,478,750	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28,869,500	28,836,500	99.89
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	159,978,500	157,953,500	98.73
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1,321,065,583		-
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1,102,701,776		-
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	608,809,350		-
10	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	11,921,990		-
11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,282,000		-
12	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	31,578,000		-
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah	4,986,500		-
14	Non Program- Belanja Tidak Langsung	1,970,739,960	1,928,084,263	97.84
	TOTAL	6,708,338,613.00	3,512,783,866.00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 6 Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Uraian Program	2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5,431,836,047	4,903,829,477	90.28	6,065,144,164	5,798,817,347	95.61	5,963,656,830	5,464,898,556	91.64	6,092,273,722	5,709,974,011	93.72
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29,400,000	26,798,825	91.15	29,400,000	20,514,135	69.78	42,870,000	32,260,300	75.25	33,095,000	26,803,629	80.99
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20,516,650	18,712,150	91.2	20,949,564	20,272,050	96.77	5,844,750	5,391,250	92.24	5,224,750	4,993,161	95.57
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	96,281,450	94,213,300	97.85	157,371,756	131,833,955	83.77	83,638,975	76,473,609	91.43	87,849,300	86,136,731	98.05
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	633,357,507	596,834,215	94.23	855,323,890	762,205,046	89.11	689,388,740	653,006,826	94.72	649,458,200	601,082,181	92.55
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan	551,547,295	538,395,540	97.62	393,668,212	365,453,110	92.83	383,077,665	371,364,390	96.94	243,398,725	243,398,725	100

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

No	Uraian Program	2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	gan Koperasi												
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1,291,441,807	596,053,620	46.15	4,073,057,464	3,542,802,051	86.98	3,856,566,510	3,621,117,349	93.89	5,787,708,648	5,528,351,052	95.52
8	Program Pengembangan UMKM	528,299,600	455,801,323	86.28	1,160,065,297	1,109,261,348	95.62	1,573,474,300	1,496,131,988	95.08	11,347,720,000	9,817,090,256	86.51
	TOTAL	8,582,680,356.00	7,230,638,450.00		12,754,980,347.00	11,751,159,042.40		12,598,517,770.00	11,720,644,268.00		24,246,728,345.00	22,017,829,745.60	

Tabel 7 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)	Capaian (%) Target Jangka Menengah (2024/Target Akhir RPJMD 2021 -2026)
			2021	2022	2023	2024		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,11	84,47	85,51	86,00	86,37%	99,57%
2.	Predikat AKIP	Predikat	A	A	A*)	A	A	100%
3.	Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	1%	1%	22,51 %	21,26%	15%	141,73%
4.	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase		11,95%	13,50 %	13,99%	22.53	62,09%
5.	Jumlah koperasi baru	Koperasi	12 Koperasi	4 Koperasi	5 Koperasi	9 Koperasi	5%	180,00%
6.	Persentase peningkatan asset koperasi	Persentase		-21,88%	-0,85%	2,25%	0.5%	450,0%
7.	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	5%	5%	21,23 %	0,35%	5%	7,00%
8.	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	0,05%	0,77%	18,43 %	0,98%	0,05%	1960,00%

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

2.1.5.2 Kelompok Sasaran dan Mitra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM memberikan pelayanan baik kepada internal dinas maupun kepada *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* lainnya yang dimaksud meliputi Perangkat Daerah, KSP/USP, dan pelaku UMKM. Adapun uraian program, kelompok sasaran, dan mitra perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 8 Sasaran dan Mitra Perangkat Daerah

No	Uraian Program	Kelompok Sasaran	Mitra Perangkat Daerah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BKPP, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Setda Bagian Pembangunan Setda, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi Setda Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Koperasi UKM, Dinas pariwisata, Dinas Pertanian Pangan dan perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan,	BKPP, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Setda Bagian Pembangunan Setda, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi Setda Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Dinas Koperasi UKM, Dinas pariwisata, Dinas Pertanian Pangan dan perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	KSP/USP di Kabupaten Sleman	DPMPTSP
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	KSP/USP di Kabupaten Sleman	-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	KSP/USP di Kabupaten Sleman	-
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	KSP/USP di Kabupaten Sleman, Masyarakat Sleman	-
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	KSP/USP di Kabupaten Sleman	DPMPTSP
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pelaku UMKM	Kapanewon, Disperindag, DPMPTSP
8	Program Pengembangan UMKM	Pelaku UMKM	Dinas Kesehatan (Standardisasi produk)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan dalam renstra ini didefinisikan dengan kesenjangan antara realita dan kondisi ideal.

1. Telaah Pemasalahan dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sleman

Berdasarkan tugas dan fungsi serta permasalahan yang telah dipetakan di dalam Rancangan Awal RPJMD, maka permasalahan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Koperasi dan UKM adalah kurang optimalnya sektor perekonomian sekunder khususnya industri pengolahan.

Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan di Sleman pada PDRB seharusnya bisa menjadi potensi bagi sektor perekonomian. Namun, pada tahun 2023 sektor sekunder hanya bertumbuh 3% atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan.

Kontribusi dari industri pengolahan banyak didominasi oleh industri kecil dan menengah. Sehingga pemberdayaan pada usaha industri kecil dan menengah ini menjadi permasalahan vital yang perlu segera diatasi. Dari permasalahan makro tersebut, Dinas Koperasi dan UKM memiliki tantangan terkait dengan tugas dan fungsi dinas sebagai perwakilan pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk pembinaan dan pengembangan dari UKM. Lebih spesifik, permasalahan yang dihadapi tantangan dinas antara lain:

a. Profesionalitas Koperasi

Profesionalitas dari pengurus koperasi dan manajemen UKM yang masih rendah ini disebabkan karena keterbatasan manajemen, kurangnya keterampilan, minimnya akses teknologi dan sumber daya. Di sisi lain, berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Usaha Mikro didapatkan permasalahan dari sisi pelaku usaha yaitu banyaknya pemilik usaha yang juga merangkap sebagai karyawan menyebabkan pemilik usaha masih berfokus pada operasional sehari-hari dan tidak memiliki waktu untuk mengevaluasi kegiatan operasionalnya. Sehingga pemahaman untuk peningkatan melalui evaluasi berkala serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar yang lebih luas masih terbatas.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Koperasi terdapat permasalahan yaitu terbatasnya kemampuan pengawas koperasi dalam bidang keuangan sehingga kurang optimal dalam melakukan analisis kesehatan Koperasi. Selain itu, kemampuan berusaha/berbisnis dari pengurus koperasi juga masih rendah sehingga pengembangan jenis usaha koperasi terbatas.

Prosentase jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sleman berdasarkan laporan pelaksanaan RAT dibandingkan jumlah seluruh koperasi aktif sebesar 65.65% sehingga perlu dioptimalkan.

b. Daya saing UKM

Jika dibandingkan dengan usaha skala besar dan korporasi, daya saing koperasi dan UMKM masih rendah. Berbagai faktor

penghambatnya adalah dari skala ekonomi (*economics scale*) yang menyebabkan tingginya biaya produksi. Selain itu, keterbatasan modal dan rendahnya ketersediaan *talent* untuk melakukan inovasi menjadi faktor penghambat utama. Berdasarkan realisasi omset pelaku usaha mikro, terjadi penurunan pertumbuhan omset dari tahun 2023 ke 2024 jika dibandingkan realisasi omset pelaku usaha mikro tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022 s/d 2024 realisasi omset pelaku usaha mikro sebesar 0.77%, 18.43% dan 0.98%.

- c. Kolaborasi dan penguatan ekosistem Koperasi dan UKM
Pengurus Koperasi dan pelaku UKM masih belum berkolaborasi secara terstruktur dan sistematis. Meskipun keduanya seringkali berada di ekosistem yang saling bersinggungan. Namun, kolaborasi antara keduanya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesadaran, kemauan, dan melakukan aksi. Selain itu, belum adanya kerangka kerja kolaborasi yang saling menguntungkan antara koperasi dengan UKM, UKM dengan UKM, maupun antar koperasi. Saat ini, proses kolaborasi masih dilakukan sendiri-sendiri namun dalam ekosistem yang terbatas dalam bentuk komunitas.

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

2. Telaahan penjaringan permasalahan dari tim pelaksana di Dinas Koperasi dan UKM

Selain mengacu pada Rancangan Awal RPJMD, Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan sinkronisasi dengan Tim Pelaksana Dinas dan menghasilkan pemetaan permasalahan yang lebih detail berdasarkan pengalaman dan pengkajian yang mendalam. Adapun hasil sinkronisasi pemetaan masalah tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Permasalahan Kinerja Sektor Sekunder Khususnya Industri Pengolahan yang Belum Optimal

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Penjaringan Aspirasi/telaahan RPJMD
Belum optimalnya kinerja sektor sekunder	Belum optimalnya perkembangan usaha koperasi	Masih rendahnya kepatuhan legalitas kelembagaan koperasi	Masih rendahnya Koperasi primer kabupaten yang memiliki legalitas Koperasi yaitu sebanyak 33 koperasi primer kabupaten yang telah ber NIB
			Masih banyaknya koperasi yang bergantung pada bantuan/subsidi pemerintah dalam kepengurusan badan hukum
		Masih rendahnya jumlah Koperasi aktif	Turunnya pertumbuhan koperasi aktif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, 2023, 2024 dan jumlah Koperasi aktif sebanyak 326, 330, dan 329
			Masih banyak koperasi yang pasif dalam tiga tahun terakhir, yaitu 92 koperasi.
			Prosentase jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sleman berdasarkan laporan pelaksanaan RAT dibandingkan jumlah seluruh koperasi aktif sebesar 65.65%
		Masih rendahnya persentase KSP/USP koperasi sehat dan cukup sehat	Masih rendahnya koperasi yang sehat yaitu sebanyak 10 koperasi dan yang cukup sehat sebanyak 65 koperasi.
		Masih rendahnya persentase pengurus/pengawas dan pengelola koperasi yang	Masih rendahnya pemahaman pengurus/pengawas dan pengelola koperasi terhadap manajemen perkopersian

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

		sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	
		Masih rendahnya persentase peningkatan volume usaha koperasi	Turunnya tingkat pertumbuhan omset usaha koperasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024 omset usaha Koperasi aktif sebesar 1.194.060.415.822, 1.407.384.749.014, dan 1.140.788.039.282.
			Kurangnya kemitraan dan jaringan usaha serta pemasaran koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk dan memperoleh akses informasi pasar
	Belum optimalnya perkembangan usaha mikro	Legalitas usaha mikro masih rendah	Masih rendahnya UMKM yang ber NIB, yaitu sebanyak 75.407 UMKM.
			Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas Usaha.
		Usaha mikro naik kelas relatif masih sedikit	Turunnya pertumbuhan jumlah UMKM naik kelas. Pada tahun 2022 sebanyak 2.875 UMKM, tahun 2023 sebanyak 4.999 UMKM, dan tahun 2024 sebanyak 2.238 UMKM.
			Pelaku usaha masih belum siap terhadap sistem kemitraan dalam pemasaran sehingga kurang menjaga jejaring, menjaga konsistensi kualitas dan memperbaiki proses produksi.
			Pelaku usaha masih belum memahami manajemen pemasaran berbasis perilaku konsumen
			Pelaku usaha belum memiliki mentalitas dan kerangka berfikir inovatif

2.2.2 Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM

Pemetaan isu strategis disusun berdasarkan turunan dari pemetaan isu strategis global, nasional, provinsi, daerah, dan isu strategis yang mempengaruhi potensi daerah yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi dan UKM. Isu strategis ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025 s/d 2029 dalam berupaya menguatkan potensi daerah. Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Sleman salah satunya dari pengembangan wilayah pariwisata yang berkaitan dengan sektor sekunder khususnya industri pengolahan. Namun sektor ini masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan penerapan teknologi belum optimal, penerapan rekayasa produksi untuk mengatasi permasalahan cuaca dan alam masih rendah, biaya produksi yang tinggi, dan minimnya SDM yang kompeten. Berdasarkan kajian tersebut, maka isu strategis yang relevan dan menjadi kewenangan untuk memaksimalkan potensi Koperasi dan UKM yaitu :

1. *Artificial Intelligence/AI*

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Teknologi ini termasuk kemampuan belajar, pemecahan masalah, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan.

AI untuk UMKM menjadi salah satu terobosan teknologi yang dapat membantu usaha mikro, kecil dan menengah mencapai potensi maksimalnya. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memahami pelanggan dengan lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan omset bisnis mereka secara signifikan.

Beberapa Poin Penting untuk Diketahui:

- Dengan AI, UMKM dapat mengotomatisasi proses yang memakan waktu.
- Dengan AI, UMKM dapat menganalisis data pelanggan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Dengan AI, UMKM dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi layanan.
- Teknologi AI yang efektif termasuk *chatbot*, analisis data, dan prediksi tren pasar.
- UMKM dapat memulai dengan AI melalui platform berbasis cloud yang ramah anggaran.

2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Keputusan Bupati Sleman yang telah diubah beberapa kali, terakhir keputusan Bupati Sleman Nomor 1.9/Kep.KDH/A/2025 Tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sleman. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu anggota Tim tersebut yang bertugas salah satunya untuk pembinaan dan pengembangan UMKM.

Kebijakan program dan kegiatan P3DN Kabupaten Sleman berpedoman pada Keputusan Bupati Sleman Nomor 56.2/Kep.KDH/A/2023 Tentang Peta Jalan (Roadmap) Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026.

3. Penetapan Geopark Nasional

Geopark Jogja telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 171.K/GL.01/2025 sebanyak 15 (lima belas) lokasi. Dari 15 (lima belas) lokasi tersebut, 7 (tujuh) diantaranya terletak di Kabupaten Sleman. Selain itu, Geopark Jogja di Sleman terdiri dari Situs Keanekaragaman Hayati (*biosite*) sebanyak 2 (dua) lokasi. Dalam pengembangan Geopark tersebut, terdapat 3 (tiga) pilar utama yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (pembangunan perekonomian masyarakat). Salah satu program kerja pada pilar ketiga yaitu pembangunan perekonomian masyarakat adalah pengembangan Geoproduk. Geoproduk ini merupakan produk dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah yang memiliki keterkaitan dengan keunikan geologi (*geosite*), keanekaragaman hayati (*biosite*), dan budaya di wilayah itu sendiri (*culturesite*). Di Kabupaten Sleman, produsen dari produk-produk potensial maupun pelaku usaha jasa yang dapat diangkat sebagai Geoproduk Sebagian besar adalah UMKM dan Koperasi.

4. Koperasi Desa Merah Putih

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan yang diimplementasikan lewat usaha koperasi. Selain itu, fenomena

urbanisasi didorong oleh masyarakat yang mencari pekerjaan menjadikan saturasi penduduk kota sangat tinggi dan desa kekurangan tenaga kerja. Di sisi lain, desa memegang peran penting dalam memperkuat sektor pangan, menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka Presiden RI telah menetapkan kebijakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menerbitkan :

- Keputusan Presiden No.9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500.3/2438/SJ Tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
- Surat Menko Pangan RI NO. B-235/SES M PANGAN/SD/05/2025 Hal Percepatan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga ditingkat konsumen, meningkatkan harga ditingkat petani hingga NTP atau kesejahteraan petani naik, menekan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM, serta menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih juga dapat mendukung program pengendalian inflasi daerah.

Sehubungan dengan amanat tersebut, Bupati melalui Perangkat Daerah perlu melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas, serta penyusunan *roadmap* implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Di Kabupaten Sleman saat ini terdapat 81 KDMP yang sudah berbadan hukum.

5. Desa Preneur

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berinisiatif menyusun program Desa Preneur di wilayah DIY. Program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dengan

mengembangkan potensi lokal dan jiwa kewirausahaan masyarakat. Desa preneur atau "desa wirausaha" adalah konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kegiatan wirausaha. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi lokal dan kearifan lokal untuk menciptakan unit usaha yang berkualitas dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha untuk mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan desa.

6. Pengembangan UMKM Hulu – Hilir

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat beragam yang mencakup berbagai jenis usaha termasuk di dalamnya subsektor kreatif. Beberapa sektor yang umum antara lain kuliner, fashion, agribisnis, kerajinan, otomotif, elektronik, jasa, dan sebagainya. Kabupaten Sleman pada Tahun 2024 ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif dengan 3 (tiga) subsektor unggulan film animasi dan video, kriya bambu, dan seni pertunjukan. Dengan sektor pariwisata sebagai unggulan di wilayah Kabupaten Sleman, UMKM menjadi gerbong utama atau "main tenant" yang layak diperhitungkan sebagai sektor strategis. Untuk itu, pengembangan sektor UMKM harus dituangkan dalam peta jalan agar lebih terstruktur, fokus, berkelanjutan, dan sinergi sehingga dapat mencakup pengembangan dari hulu sampai dengan hilir. Dalam mewujudkan pengembangan UMKM dari hulu sampai dengan hilir perlu peran stakeholder yang akan berperan sebagai perencana sekaligus evaluator atas setiap strategi, program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan UMKM.

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 10 Pemetaan Isu Strategis Dinas Koperasi UKM Sleman

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Dinas Koperasi UKM
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi pengembangan wilayah pariwisata khususnya wisata kuliner dan agrowisata; terbukanya akses transportasi logistik dengan adanya tol baru	Sektor ekonomi sekunder khususnya industri pengolahan belum optimal	Meningkatnya Fasilitas kredit industri kecil/UMKM; Meningkatnya kualitas industri kecil		Terbatasnya integrasi global dan domestik masih terbatas		Pendapatan pelaku UMKM cenderung stagnan
			Perubahan Iklim	Ketidakpastian cuaca dan bencana alam	Cuaca dan iklim yang sulit diprediksi	Menurunkan ketergantungan UMKM terhadap alam dan cuaca
			Ketidakpastian geopolitik			Adanya tekanan pada daya beli karena optimisme UMKM menurun
			Fluktuasi nilai tukar	Ketidakpastian harga bahan baku UMKM dari impor		Ketergantungan UMKM terhadap bahan baku impor menyebabkan HPP fluktuatif
			Dampak Perang Dagang	Terbatasnya ekspor ke negara tertentu Peningkatan Penggunaan		Penerapan teknologi digital pada UMKM belum optimal Jejaring dan pangsa pasar

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

				Produk Dalam Negeri		UMKM belum cukup luas
				Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih		

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM

Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2025-2029 memperhatikan sasaran dari RPJMD Kabupaten Sleman dan NSPK. Tujuan dari Dinas Koperasi berbentuk kondisi ideal dari suatu ruang lingkup pada 5 (lima) tahun mendatang yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi dan UKM. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, perlu adanya sebuah langkah konkrit dan terukur untuk menjadi landasan dari usaha mencapai tujuan yang disebut dengan sasaran. Adapun sasaran Dinas Koperasi dan UKM sasaran sebagai berikut :

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 11 Indikator Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Sektor Sekunder	Peningkatan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal		Rasio pelaku UMKM	14.1	14.3	14.4	14.6	14.8	15
			Rasio Anggota Koperasi dengan Angkatan Kerja	22.53	22.54	22.55	22.56	22.57	22.58
		Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio Kewirausahaan	4,74	4,89	5,02	5,14	5,24	5,34
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	2,38 - 2,51	2,39 - 2,55	2,4 - 2,58	2,41 - 2,61	2,42 - 2,64	2,43 - 2,66
Meningkatnya kualitas pelayanan		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	86.00	86.01	86.03	86.05	86.07	86.10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A	A	A	A	A

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan pola optimalisasi sumber daya dengan memperhatikan potensi daerah, isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari RPJMD.

Untuk mencapai tujuan Dinas Koperasi dan UKM diperlukan kerangka kerja yang terstruktur mulai dari strategi dan arah kebijakan untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Sehingga perlu penyusunan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang juga untuk menyelaraskan dengan RPJMD dan NSPK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Proses penyelarasan ini dilakukan dengan menggunakan teknik *cascading* atau penurunan kinerja.

Berdasarkan RPJMD, bidang ekonomi dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Meningkatnya sektor sekunder adalah sasaran RPJMD yang menjadi salah satu ruang lingkup kerja Dinas Koperasi dan UKM. Sebagai perdoman untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan Kabupaten Sleman yang tercantum dalam RPJMD adalah **“Mewujudkan Perekonomian yang Berkualitas”**. Kualitas ekonomi yang dimaksud adalah perekonomian yang berdaya saing, mandiri, dan terintegrasi dengan perekonomian di ruang lingkup pasar yang lebih luas.

Arah kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan menjadi strategi yang lebih spesifik dan relevan dengan Dinas Koperasi dan UKM. Dengan berpedoman pada strategi dalam RPJMD yang relevan dengan Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Koperasi dan UKM. Uraian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan renstra sebagai berikut:

Tabel 12 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan yang fleksibel	Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
		Pengintegrasian digitalisasi layanan dan sistem informasi publik	Mengintegrasikan digitalisasi layanan dan sistem informasi publik
		Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi	Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi
		Optimalisasi dengan automasi dan digitalisasi layanan publik	Mengembangkan smart governance melalui digitalisasi dan automasi layanan publik
		Optimalisasi dengan automasi dan digitalisasi layanan publik	Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital
Peningkatan kinerja kelembagaan ekonomi lokal	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Menyusun strategi pengembangan UMKM hulu - hilir	Menyusun peta pengembangan UMKM yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
		Meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap teknologi produksi	Membangun UMKM yang siap terhadap teknologi produksi
		Meningkatnya kesiapan SDM koperasi untuk adopsi teknologi digital	Membangun kesiapan SDM Koperasi untuk adopsi teknologi digital
		Mendorong penguatan branding dan inovasi yang menciptakan nilai tambah	Menguatkan branding dan inovasi yang menciptakan nilai tambah
		Meningkatkan kualitas	Menguatkan kelembagaan

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
		pengelolaan kelembagaan koperasi	koperasi yang transparan, akuntabel dan berfokus pada pelayanan
		Meningkatkan kapasitas usaha mikro dalam digitalisasi	Mengoptimalkan digitalisasi usaha
		Meningkatkan kapasitas pengelola koperasi dalam digitalisasi	Meningkatkan digitalisasi dan pengelolaan koperasi
		Meningkatkan inovasi berbasis Produk Berbahan Baku Lokal	Mendorong inovasi berbasis teknologi yang selaras dengan kearifan lokal
		Meningkatkan kelembagaan koperasi berbasis kelompok masyarakat	Membangun koperasi berbasis nilai-nilai lokal
		Memfasilitasi pengembangan jaringan pasar	Mengembangkan jaringan pemasaran dalam negeri dan luar negeri
		Memfasilitasi pengembangan kemitraan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Memantapkan konektivitas dan integrasi baik antar pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil menengah dan besar

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 13 Strategi Renstra PD (Imendagri 2)

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi	Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi	Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital	Mengembangkan implementasi smart governance melalui digitalisasi dan automasi layanan publik	Mengintegrasikan digitalisasi layanan dan sistem informasi publik
Menyusun peta pengembangan UMKM yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Membangun UMKM yang siap terhadap teknologi produksi	Mendorong inovasi berbasis teknologi yang selaras dengan kearifan lokal	Menguatkan branding dan inovasi yang menciptakan nilai tambah	Mengembangkan jaringan pemasaran dalam negeri dan luar negeri
Menguatkan kelembagaan koperasi yang transparan, akuntabel dan berfokus pada pelayanan	Membangun koperasi berbasis nilai-nilai lokal	Membangun kesiapan SDM Koperasi untuk adopsi teknologi digital	Meningkatkan digitalisasi dan pengolaan koperasi	Memantapkan konektivitas dan integrasi baik antar pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil menengah dan besar

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dari Dinas Koperasi dan UKM adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah”**, dan **”Meningkatnya Kelembagaan Ekonomi Lokal”**. Tujuan tersebut selaras dengan sasaran RPJMD dan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, dalam mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut, maka Dinas Koperasi dan UKM juga menyusun sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diturunkan secara berjenjang. Penurunan secara berjenjang ini menghasilkan beberapa program beserta dengan indikator, *output*, dan *outcome* seperti pada Tabel 14 berikut:

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 14 Uraian Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Meningkatkan kinerja kelembagaan ekonomi lokal				Rasio kewirausahaan daerah		
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP;		
			Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Kinerja Perangkat DAerah			
				1. Renstra (periode tertentu), 2. Renja, 3. Renja Perubahan, 4. Perjanjian Kinerja, 5. Perjanjian Kinerja Perubahan 6. Roadmap strategi pengembangan UMKM (periode tertentu) 7. Evaluasi pelaksanaan roadmap pengembangan UMKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				1. DPA tahun n+1, 2. Laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
				1. DPA perubahan tahun n+1, 2. Laporan hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				1. Laporan bulanan (12), 2. laporan tahunan(1), 3. laporan kinerja instansi(1) , 4.dokumen dalev(9)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Pembayaran gaji dan TPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				1. laporan SPJ (12)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				1. Laporan keuangan (2), 2. Laporan BMD (2)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah		
			Meningkatnya layanan perencanaan		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			dan keuangan				
				Penyusunan dokumen kepegawaian	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				1. laporan pengolahan administrasi kepegawaian (1)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				ac, printer dll	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Piring, gelas, tissue, sabun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				ATK, makan minum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				foto copy, cetak jilid	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				laporan fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	
				Rapat, SPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengelolaan arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				SPBE dan pengelolaan PPID	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Berbasis Elektronik pada SKPD		
				Penyediaan kebutuhan layanan jasa penunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan sarana persuratan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan jasa langganan air, listrik, telepon dan surat kabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan jasa keamanan, kebersihan, jasa pengemudi, dan sarana pendukung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Penyediaan kebutuhan layanan pemeliharaan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Barang Milik Daerah			
				Penyediaan bahan bakar minyak, pemeliharaan kendaraan dinas,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pemeliharaan meja kerja, kursi kerja, lemari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Pemeliharaan peralatan kantor yang menggunakan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Berkembangnya usaha mikro, kecil			Rasio pelaku usaha mikro		

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		dan menengah					
			Meningkatn ya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase peningkatan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berizin yang berizin	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Jumlah Usaha Mikro Terdata	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
				Fasilitasi temu kemitraan usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				fasilitasi pendampingan penerbitan Perijinan usaha (NIB,Halal,PIR T,SLHS,HAKI dll)	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Fasilitasi pembinaan & pendampingan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Satu Data UMKM Sleman	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			Meningkatn ya daya saing UMKM		Persentase peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi wirausaha mapan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	jumlah umkm yang terfasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan, SDM, pemasaran serta desain dan teknologi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Menjadi Usaha Kecil	
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Manusia, Serta Desain dan Teknologi			
		Berkembangn ya usaha koperasi			Rasio keanggotaan koperasi		
			Meningkatn ya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Persentase koperasi yang berijin	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				masyarakat perkoperasian Kabupaten Sleman	Peningkatan jumlah koperasi yang berizin	Peneribitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaandalam daerah Kabupaten/ Kota	
				peningkatan pemenuhan izin simpan pinjam (fasilitasi akta pendirian badan hukum koperasi) pendampingan pendirian, PAD,	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban koperasi			
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase koperasi yang aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Jumlah jaringan pelayanan koperasi yang dilakukan pemantauan	Peningkatan kepatuhan jaringan pelayanan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Peningkatan jumlah koperasi yang dipantau	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase KSP/USP koperasi sehat dan cukup sehat	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				KSP/USP Koperasi	Peningkatan KSP/USP Koperasi Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah unit usaha koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatn ya kualitas SDM perkoperasia n		Persentase Pengurus/pengawas dan pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				pengurus, pengawas dan pengelola koperasi	peningkatan pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan pemahaman pengetahuan perkoperasian serta kapasitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	KETERANG AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				dan kompetensi SDM			
			Meningkatn ya produktivita s koperasi		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi di Kabupaten Sleman	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

BAB V INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI UKM

Indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM menjelaskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja dan target untuk 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan dalam tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15 Uraian Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, SubKegiatan, Output, beserta dengan Target dan Pagu Indikatif

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
BIDANG SEKRETARIAT													
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan												
Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat		100		100		100		100		100		

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	daerah tersedia tepat waktu												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5	7.000.00 0,00	5	17.700.0 00,00	5	18.470.0 00,00	5	19.317.0 00,00	5	20.248. 700,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		2	1.680.0 00,00	2	1.848.00 0,00	2	2.032.80 0,00	2	2.236.08 0,00	2	2.459. 688,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	1.594.0 00,00	2	1.753.40 0,00	2	1.928.74 0,00	2	2.121.61 4,00	2	2.333. 775,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		10	4.357.2 00,00	10	4.792.90 0,00	10	5.272.20 0,00	10	5.799.40 0,00	10	6.379. 300,00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Perangkat Daerah												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu		100		100		100		100		100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32	4.851.07 3.004,00	37	5.093.62 6.654,00	37	5.348.30 7.986,00	37	5.615.72 3.386,00	37	5.896.5 09.555, 00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD		12	185.397. 600,00	12	194.667. 500,00	12	204.400. 800,00	12	214.620. 800,00	12	225.351 .900,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		2	4.231.2 00,00	2	4.442.70 0,00	2	4.664.80 0,00	2	4.898.20 0,00	2	5.143. 100,00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD												
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah													
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan												
Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		100		100		100		100		100		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang		100		100		100		100		100		

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	dilaksanakan tepat waktu												
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	20.190.4 00,00	1	22.209.4 40,00	1	24.430.3 84,00	1	26.873.4 22,00	1	29.560. 765,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum		100		100		100		100		100		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	7.875.0 00,00	2	8.662.50 0,00	2	9.528.75 0,00	2	10.481.6 25,00	2	11.529 .788,0 0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	42.926.0 00,00	1	47.218.6 00,00	1	51.940.4 60,00	1	57.134.5 06,00	1	62.847. 957,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	115.571 .600,00	3	127.128. 760,00	3	139.841. 636,00	3	153.825. 800,00	3	169.20 8.380, 00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	11.754. 800,00	1	12.930.2 80,00	1	14.223.3 08,00	1	15.645.6 39,00	1	17.210 .203,0 0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	14.100. 000,00	12	15.510.0 00,00	12	17.061.0 00,00	12	18.767.1 00,00	12	20.643 .810,0 0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	63.436. 000,00	6	69.779.6 00,00	6	76.757.5 60,00	6	84.433.3 16,00	6	92.876 .648,0 0	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	40.277. 800,00	1	44.305.5 80,00	1	48.736.1 38,00	1	53.609.7 52,00	1	58.970 .727,0 0	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan		1	38.156. 800,00	1	41.972.4 80,00	1	46.169.7 28,00	1	50.786.7 01,00		55.865 .371,0 0	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Berbasis Elektronik pada SKPD												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang		100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	234.300.000,00	12	257.730.000,00	12	283.503.000,00	12	311.853.300,00	12	343.038.630,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6	844.756.800,00	6	929.232.480,00	6	1.022.155.728,00	6	1.124.371.301,00	6	1.236.808.431,00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah		100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9	137.537 .500,00		151.291. 250,00		166.420. 375,00		183.062. 413,00		201.36 8.654, 00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		20	13.155. 000,00	20	14.470.5 00,00	20	15.917.5 50,00	20	17.509.3 05,00	20	19.260 .236,0 0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	48.876.0 00,00	10	53.763.6 00,00	10	59.139.9 60,00	10	65.053.9 56,00	10	71.559. 352,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan		2	89.550.0 00,00	2	98.505.0 00,00	2	108.355. 500,00	2	119.191. 050,00	2	131.110 .155,00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi												
BIDANG USAHA MIKRO													
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berizin yang berizin												
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase peningkatan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berizin yang berizin		0.8		0.81		0.82		0.83		0.84		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin		9,00 %		10,0 0%		11,0 0%		12,0 0%		13,0 0%		

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30	137	714.856.800,00	137	82.144.480,00	137	90.359.000,00	137	99.395.000,00	137	109.335.000,00	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	740	740	244.799.267,00	740	328.670.979,00	740	345.104.528,00	740	362.359.755,00	740	380.477.742,00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	740	895	1.723.140.117,00	985	100.779.865.800,00	01.08	103.803.261.700,00	1.19	106.917.359.600,00	1.31	110.124.880.400,00	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	500	545	2.767.063.500,00	555	2.218.616.072,00	561	2.401.972.773,00	567	2.642.170.050,00	574	2.906.387.055,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi												

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	wirausaha mapan												
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi wirausaha mapan		5,50 %		6,00 %		6,50 %		7,00 %		7,50 %		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Menjadi Usaha Kecil	jumlah umkm yang terfasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan, SDM, pemasaran serta desain dan teknologi		5,50 %		6,00 %		6,50 %		7,00 %		7,50 %		
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan	250	150	649.968 .400	150	762.936. 060	150	772.474. 000	150	904.681. 400	150	986.35 3.540	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi												
BIDANG KOPERASI													
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang berijin												
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang berijin		10,4 4%		12,6 1%		14,9 6%		17,4 8%		20,1 7%		
Peneribitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaaandalam daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang berizin		4,50 %		5,00 %		5,50 %		6,00 %		6,50 %		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	30	35	87.752.2 00,00	43	193.752. 200,00	55	217.752. 200,00	69	245.752. 200,00	85	277.752 .200,00	

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif												
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang aktif		78,6 5%		78,9 0%		79,1 5%		79,4 0%		79,6 5%		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kepatuhan jaringan pelayanan koperasi		78,6 5%		78,9 0%		79,1 5%		79,4 0%		79,6 5%		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	1000 ,00%	150 0,00 %	78.871.2 00,00	170 0,00 %	34.934.2 00,00	200 0,00 %	38.427.6 00,00	230 0,00 %	42.270.3 00,00	250 0,00 %	46.497. 500,00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat dan cukup sehat												

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP koperasi sehat dan cukup sehat		%		36,9 7%		38,2 2%		39,7 2%		41,4 7%		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan KSP/USP Koperasi Sehat		35,9 7%		36,9 7%		38,2 2%		39,7 2%		41,4 7%		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75	100	184.364. 769,00	100	147.658. 500,00	100	162.424. 350,00	100	178.666. 785,00	100	196.533 .400,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus/penga was dan pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi												
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Pengurus/pengaw as dan pengelola koperasi yang		48,7 3%		53,9 0%		58,9 5%		63,9 8%		68.9 9%		

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	sudah memiliki sertifikat uji kompetensi												
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi		20%		25%		30%		35%		40%		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	425	728	1.091.116.850,00	728	1.182.391.489,00	728	915.630.637,00	728	1.007.193.701,00	728	1.107.913.071,00	
PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi												
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi		9,42 %		12,6 2%		16,1 7%		20,0 8%		24,3 4%		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume usaha		9,42 %		12,6 2%		16,1 7%		20,0 8%		24,3 4%		

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTP UT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BAS ELIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	koperasi di Kabupaten Sleman												
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10	12	299.132. 600,00	13	1.033.80 0.000,00	14	1.058.80 0.000,00	15	715.800. 000,00	16	1.108.8 00.000, 00	

Program prioritas Daerah mengacu pada visi misi dari Kepala Daerah. Misi Kepala Daerah Sleman salah satunya adalah Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi masyarakat. Program Prioritas Daerah yang menjadi bagian kewenangan dari Dinas Koperasi dan UKM adalah peningkatan akses dan kapasitas UMKM serta penciptaan wirausaha muda. Program ini diturunkan menjadi kegiatan dan sub-kegiatan berdasarkan keselarasan dari *outcome*. Adapun program dan sub program Dinas Koperasi dan UKM dijabarkan pada tabel 16 sebagai berikut :

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Tabel 16 Program Prioritas Kabupaten Sleman yang selaras dengan kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi UKM Sleman

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Transparan, Akuntabel Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Perangkat Daerah" 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan 3. Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5. Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan 2. Administrasi Kepegawaian 3. Penyediaan Komponen Instalasi 4. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Fasilitas Kunjungan Tamu 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12. Dukungan Pelaksanaan Sistem 13. Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 2. Perorangan Dinas atau Kendaraan 3. Dinas Jabatan 4. Pemeliharaan Mebel 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 7. Kantor dan Bangunan Lainnya
Peningkatan Akses dan Kapasitas UMKM, dan Penciptaan Wirausaha Muda	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan 1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
	Meningkatnya daya saing UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Menjadi Usaha Kecil 1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Rencana Strategis*Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029***Tabel 17 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86.00	86.01	86.03	86.05	86.07	86.10	
2	Predikat AKIP	Predikat	A 83,40	A 83,50	A 83,60	A 83,80	A 83,90	A 84,00	
3	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	14.11	14.27	14.41	14.59	14.79	15	
4	Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	22.53	22.54	22.55	22.56	22.57	22.58	
5	Rasio kewirausahaan	Persentase	4,74	4,89	5,02	5,14	5,24	5,34	
6	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	2,38 - 2,51	2,39 - 2,55	2,4 - 2,58	2,41 - 2,61	2,42 - 2,64	2,43 - 2,66	

BAB VI PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi dan UKM periode tahun 2025 – 2030 ini memuat tentang pendahuluan, permasalahan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta program/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan dan kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk menyikapi berbagai perubahan yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjadi pedoman bagi pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.

Rencana strategis ini disusun sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu sinergitas antar *stakeholders* baik dari perangkat daerah maupun unsur lainnya agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (*akuntabel*) serta dapat menciptakan *clean and good governance*. Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM merupakan pedoman *stakeholders* terkait dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sleman untuk masa periode 5 (lima) tahun ke depan.

Terdapat 8 (delapan) program yang dijabarkan dalam kegiatan pada renstra selama periode 5 (lima) tahun. Delapan program tersebut memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan terhadap berbagai perubahan yang dimungkinkan terjadi dan mempengaruhi pengembangan bidang Koperasi dan UKM. Dengan Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan serta memberikan kontribusi kepada pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sektor Usaha Koperasi Tahun 2021-2024

No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	17	17	16	17	17
2	Koperasi Pondok Pesantren	4	4	4	3	3
3	Koperasi Kerajinan/Industri	1	1	1	1	1
4	Koperasi Pegawai Negeri RI	69	70	68	67	65
5	Koperasi Karyawan	28	25	25	24	22
6	Koperasi Angkatan Darat	7	5	6	6	6
7	Koperasi Angkatan Udara	4	4	3	2	2
8	Koperasi Kepolisian	2	2	2	2	2
9	Koperasi Serba Usaha	90	87	81	80	79
10	BMT/KJKS	36	0	0	0	0
11	Koperasi Pasar	4	4	3	3	3
12	Koperasi Simpan Pinjam	67	66	67	66	65
13	Koperasi Angkutan Darat	2	4	3	3	3
14	Koperasi Angkutan Udara			1	1	1
15	Koperasi Wisata	1	1	1	1	1
16	Koperasi Wanita	9	10	10	10	10
17	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
18	Koperasi Wredatama	5	5	5	5	5
19	Koperasi Pepabri	12	13	13	13	13
20	Koperasi Mahasiswa	8	8	6	5	5
21	Koperasi Pedagang Kaki Lima	0	0	0	0	0
22	Koperasi Pertanian	13	13	15	15	16
23	Koperasi Perikanan	0	1	0	0	0
24	Koperasi Peternakan	4	4	4	3	3
25	Koperasi Pusat/Sekunder	2	0	2	2	2

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

26	Kopti	1	1	1	1	1
27	Koperasi Jasa	20	0	0	0	
Jumlah Koperasi		407	346	338	331	326

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Lampiran 2. Data Koperasi Berdasarkan Kapanewon Tahun 2021-2024

NO	KAPANEWON / KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	MOYUDAN	11	11	11	11	11	11
2	GAMPING	25	25	26	27	27	24
3	SLEMAN	58	56	57	59	59	60
4	TEMPEL	18	18	18	19	16	19
5	TURI	14	13	13	13	14	15
6	SEYEGAN	14	13	14	14	16	16
7	GODEAN	13	14	14	14	15	15
8	MLATI	32	31	31	31	30	31
9	KALASAN	24	24	27	26	28	28
10	NGEMPLAK	18	19	18	19	21	18
11	CANGKRINGAN	15	15	16	16	16	16
12	MINGGIR	11	11	11	11	11	12
13	DEPOK	70	68	67	63	60	58
14	BERBAH	12	12	12	11	12	11
15	PRAMBANAN	14	14	15	14	17	16
16	NGAGLIK	36	39	44	44	43	45
17	PAKEM	25	24	26	27	26	26
JUMLAH		410	407	420	419	422	421

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

Lampiran 3. Data UMKM Berdasarkan Sektor (PDRB) 2021-2024

NO	SEKTOR USAHA (PDRB)	2021				2022				2023				2024			
		Mikro	Kecil	Menengah	TOTAL	Mikro	Kecil	Menengah	TOTAL	Mikro	Kecil	Menengah	TOTAL	Mikro	Kecil	Menengah	TOTAL
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	4237	2	0	4239	4274	0	0	4274	6753	7	0	676	6798	7	0	6805
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	54	0	0	54	55	0	0	55	71	0	0	71	71	0	0	71
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9397	134	2	9533	9666	2	1	9669	10783	19	1	10803	10801	19	1	10821
4	PENGADAAN LISTRIK, GAS,	280	0	0	280	280	0	0	280	491	0	0	491	496	0	0	496
5	PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, LIMBAH, DAN DAUR ULANG	166	0	0	166	167	0	0	167	227	0	0	227	226	0	0	226
6	KONSTRUKSI	332	10	2	344	343	1	0	344	445	2	1	448	451	2	1	454
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	25131	402	15	25548	25637	9	1	25647	29007	105	5	29117	29014	105	5	29124
8	TRANSPORTASI DAN PEGUDANGAN	511	29	5	545	541	5	0	546	684	5	1	690	687	5	1	693
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	21302	35	0	21337	21625	1	0	21626	25297	9	0	25306	25414	11	0	25425
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	323	1	0	324	327	0	0	327	404	2	0	406	404	2	0	406
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	14	1	0	15	15	0	0	15	20	0	0	20	21	0	0	21
12	REAL ESTAT	24	0	0	24	24	0	0	24	25	3	0	28	25	3	0	28
13	JASA PERUSAHAAN	303	7	0	310	310	0	0	310	343	1	0	344	345	1	0	346
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6	0	0	6	6	0	0	6	8	0	0	8	8	0	0	8
15	JASA PENDIDIKAN	210	0	0	210	217	0	0	217	301	0	0	301	305	0	0	305
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	137	0	0	137	142	0	0	142	196	0	0	196	199	0	0	199
17	JASA LAINNYA	2677	29	0	26799	26906	1	1	26908	3452	15	3	34538	34696	15	3	34714

Rencana Strategis
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

TOTAL	65104	650	24	89871	90535	19	3	90557	78507	168	11	103670	109961	170	11	110142
-------	-------	-----	----	-------	-------	----	---	-------	-------	-----	----	--------	--------	-----	----	--------

Lampiran 4. Data UMKM Berdasarkan Kapanewon Tahun 2021-2024

NO	NAMA KECAMATAN	2021	2022	2023	2024
----	----------------	------	------	------	------

Rencana Strategis

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 2025-2029

		Mikro	Kecil	Menengah	JML	Mikro	Kecil	Menengah	JML	Mikro	Kecil	Menengah	JML	Mikro	Kecil	Menengah	JML
1	MOYUDAN	3.854	56	3	3.913	3.933	3	0	3.936	5.315	10	0	5.325	5,332	10	0	7915
2	GAMPING	5.405	44	2	5.451	5.481	0	0	5.481	7.835	4	1	7.84	7,909	5	1	7991
3	SLEMAN	8.163	37	4	8.204	8.229	2	2	8.233	9.078	15	2	9.095	9,283	16	2	5342
4	TEMPEL	6.536	40	4	6.58	6.606	5	0	6.611	7.404	32	1	7.437	7,407	32	1	4433
5	TURI	3.726	18	0	3.744	3.77	0	0	3.77	4.184	4	0	4.188	4,184	4	0	5996
6	SEYEGAN	5.249	41	1	5.291	5.338	1	0	5.339	5.981	2	0	5.983	5994	2	0	7369
7	GODEAN	7.044	14	0	7.058	7.183	1	0	7.184	7.984	4	0	7.988	7987	4	0	10734
8	MLATI	6.302	37	0	6.339	6.377	0	0	6.377	7.353	12	1	7.366	7.356	12	1	5101
9	KALASAN	7.13	54	0	7.184	7.21	1	0	7.211	7.946	9	0	7.955	7.956	9	0	5040
10	NGEMPLAK	5.23	28	0	5.258	5.284	1	0	5.285	5.963	4	1	5.968	5.966	4	1	7965
11	CANGKRINGAN	2.204	36	1	2.241	2.241	2	1	2.244	2.755	5	0	2.76	2.757	5	0	5971
12	MINGGIR	4.086	5	0	4.091	4.096	0	0	4.096	4.433	1	0	4.434	4.432	1	0	8301
13	DEPOK	9.044	121	0	9.165	9.246	0	0	9.246	10.703	24	1	10.728	10.709	24	1	9301
14	BERBAH	4.216	16	0	4.232	4.268	0	0	4.268	5.083	1	0	5.084	5.1	1	0	7440
15	PRAMBANAN	2.765	17	1	2.783	2.827	0	0	2.827	5.019	8	1	5.028	5.031	8	1	4188
16	NGAGLIK	4.767	48	4	4.819	4.903	2	0	4.905	8.254	27	2	8.283	8.272	27	2	4293
17	PAKEM	3.476	38	4	3.518	3.543	1	0	3.544	4.285	6	1	4.292	4.286	6	1	2762
	JUMLAH	89.197	650	24	89.871	90.535	19	3	90.557	109.575	168	11	109.754	109.961	170	11	110142